

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Diakses tanggal 28 Maret 2022 dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme-penyaluran-dana-desa-dari-rkun-ke-rkud>.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.03/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*. Jakarta: Seretariat Negara.
- Lokadata. (n.d.). <https://lokadata.beritagar.id>. Diakses tanggal 28 Maret 2022 dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/anggaran-dana-desa-2015-2020-1565947501>.
- Maulida, R. (2018, September 28). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Diakses tanggal 28 Maret 2022 dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>.
- Pangestuti, A. N. (2021). *Tinjauan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Pemanfaatan Dana Desa : Studi Kasus Desa Banjaranyar*. Tangerang Selatan: PKN STAN.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Purnama, C. W. (2021). *Tinjauan atas Pemenuhan Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Instansi Pemerintah Desa (Studi Komparasi Desa Karanganyar dan Desa Balong*. Tangerang Selatan: PKN STAN.
- Setiawan, A. (2019, Juni 24). *Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa*. Diakses tanggal 28 Maret 2022 dari <https://setkab.go.id/>: <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-des/>
- Simorangkir, E. (2017, Agustus 19). *Pemerintah Kucurkan Dana Desa Sejak 2015, Apa Saja Hasilnya?*. Diakses tanggal 22 Maret 2022 dari <https://finance.detik.com/>: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3606172/pemerintah-kucurkan-dana-des-sejak-2015-apa-saja-hasilnya>
- Tokopedia. (n.d.). *Pajak*. Diakses 28 Maret 2022 dari <https://kamus.tokopedia.com/p/pajak/>.
- Wahyu, S. D., Burhan, I., & Akrim, D. (2020). Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa). *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 78-91.
- Wibowo, D. M. (2019, Mei 29). <https://www.wartaekonomi.co.id>. Diakses 22 Maret 2022 dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-des-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-des.html>.
- Wicaksono, G. (n.d.). *Perpajakan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Dana Desa*. Diakses tanggal 28 Maret 2022 dari <https://www.iaijawatimur.or.id>: <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/14>